BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa, “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, Selain memiliki manfaat yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga menghasilkan keturunan yang merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik.

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Orang tua adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi pendidikan yang baik serta memberikan kasih sayang terhadap

anak. Namun, seringkali tanggung jawab ini terabaikan oleh orang tua dikarenakan satu dan hal lain.

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari'at Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), demi melestarikan keturunan dan menghindari kesyubhatan (tercemar) dalam penentuan nasab. Nasab merupakan keterikatan hubungan darah atau pertalian darah antara anak dengan orang tuanya, yang hubungan darah tersebut diperoleh melalui jalan hubungan seksual dalam bingkai perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Untuk itu, nasab tidak dianggap ketika hanya dilakukan hubungan seksual semata, tanpa ada ikatan perkawinan yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan zina di luar pagar ikatan pernikahan.

Perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*".

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan sah, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan yang sah.

Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, utamanya muda-mudi yang berakibat melakukan hubungan bebas diluar ikatan perkawinan, seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan bahkan hingga melahirkan sebelum sempat dilakukan pernikahan. dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin.

Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak

sah pada umumnya dan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹

Sebaliknya anak tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya, artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, dan anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak tidak sah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.²

Dengan demikian, hamil sebelum diadakan akad nikah, atau sampai melahirkan sebelum diadakan akad nikah, telah menjadi problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa dampak kegelisahan masyarakat terutama bagi orang tua, guru, tokoh-tokoh masyarakat, sarjana muslim, ulama dan juga para penegak hukum. Pada merekalah

¹ J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008), hlm. 53.

² Endang Sumiarni dan Chandra halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), hal 4.

terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum islam atau syari'at, yang akan melibatkan lembaga hukum atau penegak hukum dalam hal ini pengadilan agama.

Sesuai dengan gambaran di atas, Pengadilan Agama Nganjuk telah menetapkan perkara Nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj. pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Zulqa'dah 1440 H dengan pemohon yang berumur 49 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk. Pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama anak pemohon yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2001 (17 tahun 10 bulan) agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di kabupaten nganjuk, dan hubungan anak tersebut dengan pemohon adalah sebagai anak kandung. Pemohon tersebut telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama calon istri anak pemohon, umur 18 tahun 2 bulan, agama ISLAM, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di kabupaten NGANJUK. Pemohon menghendaki agar anak pemohon dengan calon istri anak pemohon segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, karena anak pemohon dengan calon istri anak pemohon telah menjalin hubungan kasih sayang selama kurang lebih 4 tahun dan keduanya sudah saling mencintai dan ingin segera dinikahkan karena istri dari anak pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berumur 1 tahun, akibat telah melakukan hubungan suami isteri dengan anak pemohon, dan dalam hasil dari putusan tersebut adalah hakim

mengabulkan permohonan dispensasi nikah dari pemohon dengan beberapa pertimbangan hakim dan juga dilandasi dengan dasar hukumnya.

Dari gambaran pokok perkara yang telah di paparkan di atas, muncul pertanyaan mengenai penetapan dalam perkara dispensasi nikah Nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj yang mana anak pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai anak yang telah berumur 1 tahun dan baru mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Nganjuk. dalam putusan tersebut tidak dijelaskan mengenai adanya status pernikahan sebelumnya antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon entah itu nikah di bawah tangan yang hanya sah secara agama (*Siri*) ataupun belum dicatatkan pada petugas pencatat akta nikah, atau kemungkinan anak tersebut lahir tanpa adanya ikatan perkawinan antara wanita yang mengandung hingga melahirkan anak tersebut dengan laki-laki yang telah menghamilinya, dari sini penulis memiliki pertanyaan besar dan sangat relevan untuk dibahas mengenai status anak yang telah terlahir dalam perkara tersebut, sebagaimana telah digambarkan dalam pokok perkara di atas. Dengan realitas tersebut, penulis ingin mendalami mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah. Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah ini, karena seorang Hakim dalam menentukan status dan nasab seorang anak itu biasanya di lihat dari kedudukan dan status kelahirannya, sedangkan dalam penelitian ini, anak yang terlahir dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj belum di ketahui

kedudukan dan status kelahirannya, sehingga sangat menarik untuk diteliti mengenai status dan nasab anak dalam perkara dispensasi nikah. Menurut penulis Pengadilan Agama Nganjuk adalah lokasi yang ideal untuk melakukan penelitian ini, dikarenakan perkara ini diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama Nganjuk, dan perkara semacam ini jarang terjadi pada Pengadilan Agama yang lain.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Mengenai Status Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan dalam konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas untuk itu penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj?
2. Bagaimana status nasab anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji:

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj.
2. Untuk mengetahui status nasab anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal hukum keluarga islam terutama mengenal hal-hal yang berkaitan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepastakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang masalah pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj.

3. Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj dan status nasab anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data-data yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Imam Mahfudin STAIN Kediri. Skripsi ini menarangkan hukum dan status anak dalam perkawinan hamil luar nikah.³
2. Penelitian yang di lakukan oleh Irmayanti Sidang UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini menarangkan status perkawinan wanita hamil

³ M. Akbar Hidayatullah, "*Hukum Dan Status Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam studi kasus di Ds. Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri*" (Skripsi, SHI, STAIN, Kediri, 2013).

menurut hukum islam dan mengetahui status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di tinjau dari hukum islam.⁴

3. Penelitian yang di lakukan oleh Ramadhita UIN Malang. Skripsi ini menarangkan pandangan hakim terhadap status keperdataan anak dari nikah sirri.⁵
4. Penelitian yang di lakukan oleh Yanuriansyah Ar Rasyid UNISMA Malang. Skripsi ini menarangkan hubungan nasab anak dari nikah sirri.⁶

Dari empat penelitian di atas, maka ditemukan persamaan dengan penelitian penulis yakni terkait metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga membahas seputar status anak dan status Nasab/keperdataan anak.

Dan dari empat judul penelitian di atas, yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus yang diteliti, bahwasanya penelitian di atas fokus penelitiannya mengenai hukum dan status anak dalam perkawinan wanita hamil luar nikah yang ditinjau dari hukum islam, dan status nasab/keperdataan anak dari nikah sirri. Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai status anak dan nasab anak yang belum jelas kedudukannya dan belum diketahui status kelahirannya.

⁴ Irmayanti Sidang, "*Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan studi analisis hukum islam*" (Skripsi, SHI, UIN Alauddin, Makassar, 2018).

⁵ Ramadhita, "*Status Keperdataan Anak dari Nikah Sirri*" (Skripsi, SHI, UIN Malang, 2011).

⁶ Yanuriansyah Ar Rasyid, "*Status Nasab Anak Dari Nikah Sirri*" (Skripsi, SHI, UNISMA, Malang, 2015).